



**DINAS SOSIAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH



# RENCANA KERJA

## Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2025



Jl. Pahlawan No 12 SMG



(024)-8311729,8311843

✉ [dinsos@jatengprov.go.id](mailto:dinsos@jatengprov.go.id)



[dinsos.jatengprov.go.id](http://dinsos.jatengprov.go.id)

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, September 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690512 199401 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2023, keberlanjutan rencana kerja tahun 2024, dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, termasuk masukan dari pokok pokok pikiran DPRD dan **diarahkan agar selalu relevan dengan perkembangan terkini (*need pursuit of relevance*)** selain itu Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah memuat faktor risiko yang disusun dalam kerangka manajemen risiko dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai **bentuk implementasi kebijakan perencanaan berbasis risiko atau *riskbased planning***.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun, penghargaan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen. Semoga segenap jajaran dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat memahami pada tingkat operasional sehingga saling bersinergi sesuai proses bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TENGAH



*[Signature]*

Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Madya

NIP. 19690512 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
LEMBAR PERNYATAAN .....	
DAFTAR GRAFIK .....	
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II    HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023</b>	
2.1 Kajian Terhadap Hasil Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.3 Isu-isu Penting / Strategis dalam penyelenggaraan tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .....	21
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD .....	23
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat .....	25
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional .....	26
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	28
3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah .....	30
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025.....	34
4.2 Manajemen resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 .....	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN MANAJEMEN RESIKO PERANGKAT DAERAH</b>	
A. Identifikasi Resiko .....	
B. Analisis Resiko .....	
C. Penetapan Resiko Prioritas .....	
D. Rencana Tindak Lanjut Pengendalian .....	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah s/d tahun 2023 .....	6
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .....	14
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah .....	25
Tabel 3.1	Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 .....	28
Tabel 3.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 .....	31
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 Dan perkiraan Maju 2026 .....	36
Tabel 4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Program / Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 .....	108

**LAMPIRAN MANAJEMEN RESIKO PERANGKAT DAERAH**

Tabel 1	Indentifikasi Resiko
Tabel 2	Analisis Resiko
Tabel 3	Resiko Prioritas
Tabel 4	Rencana Tindak Pengendalian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi : persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal Renja PD, penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan yang terakhir penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari penjabaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 disusun mengacu serta difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter” dengan prioritas daerah sebagai berikut: dengan prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;



- c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Mendasar pada hal tersebut dan sesuai dengan amanat undang-undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial, selanjutnya Arah dan Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang terkait dengan Tusi Dinas Sosial dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan untuk mendukung :

1. Prioritas 1 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastuktur yang merata dan berkualitas.
2. Prioritas 4 Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Guna mendukung ke dua prioritas diatas ditempuh melalui startegi :

1. Strategi 1 mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat dengan fokus pemenuhan *Basic Need Acces* dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Pelayanan PPKS dalam panti
  - b. Penanganan Korban Bencana
  - c. Bantuan Jaminan Sosial
2. Strategi 2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan fokus Penguatan *Sustainable livelihood* dilaksanakan penanganan fakir miskin melalui KUBE dan UEP Perorangan.
3. Strategi 3 Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan sosial, dilaksanakan melalui :
  - a. Peningkatan sarpras panti
  - b. Peningkatan kapasitas PSKS
  - c. Peningkatan kualitas data.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- k) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- l) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0001788 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran / pagu indikatif pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023;



- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 pada tahun ke-2 periode Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan secara ringkas dan jelas terhadap latarbelakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

**BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023; Analisa kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Review terhadap rancangan RKPD Prov. Jateng Tahun 2025 dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Program dan Kegiatan, Manajemen Resiko Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026, Manajemen Resiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Kajian Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah**

Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 menjadi dasar pelaksanaan kinerja tahun 2025 sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 yang memuat gambaran keberhasilan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2023 yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu : (1) Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan (2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Pencapaian target dan realisasi kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Sosial										
	Bidang Urusan Sosial										
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas		34,38	25,74	34,38	36,59	106,43	7,7	7,7	100
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas		10.365	8,292	10.365	11.029	106,41	1.076	1.076	100
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		kekerasan yang mendapatkan penanganan									
	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal		100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Pant		4,10	3,23	4,10	4.10	100	4,10	4,10	100
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam pant		10.500	10.500	10.500	10.500	100	10.500	10.500	100
	2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam pant		8.500	8.500	8.500	8.500	100	8.500	8.500	100
	3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang		2.000	2.000	2.000	2.000	100	2.000	2.000	100

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dalam Panti	mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti									
	4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti		1250	1250	1.250	1.250	100	1250	1250	100
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	%	0,29	0,38	0.29	0.44	152.80	0,29	0,44	152.80
		- Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1,82	5,53	1,82	8,21	450,45	1,82	8,21	450,45
		'- Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Fakir Miskin Wilayah I dan II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan		0,29	0,38	0,29	0,44	152,80	0,29	0.44	152,80
	2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan		100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		daerah provinsi yang tervalidasi									
	3. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial		63.820	193,531	63.820	283.267	450.45	63.820	283,267	450,45
	4. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	- Persentase korban bencana alam yang ditangani - Persentase korban bencana sosial yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegi atan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola		1	1	1	1	100	1	1	100
	Urusan Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah</u>		100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</u>		2	2	12	12	100	2	2	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	1	1	1	100	1	1	100
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	1	1	1	100	2	2	100



No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	2	12	12	100	2	2	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	2	12	12	100	2	2	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah		5	5	12	12	100	5	5	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</u>		100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun		10	10	2	2	100	10	10	100

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Prosentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui bahwa target penurunan PMKS pada tahun 2023 sebesar 2,37 % atau sebanyak 96.070 PMKS dan yang mendapatkan penanganan melampaui capaian yang telah ditargetkan yaitu sebesar 8,03%, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 dan 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran Dana Insentif Daerah yang dilaksanakan melalui BLT DID dan BLT DBHCHT, sementara indikator prosentase PSKS yang melaksanakan UKS sebesar 34,38% atau sebanyak 10,365 PSKS mendapatkan penguatan tercapai melampaui target sebesar 36,59 %

Program kegiatan yang mendukung penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi :

### **1. Program Rehabilitasi Sosial**

#### **a. Bantuan SOSH Permakanan di Panti Swasta (LKS/LKSA)**

Melalui kegiatan pemberian bantuan permakanan SOSH di Panti Swasta atau LKS / LKSA sebanyak 4.450 orang dengan rincian sebagai berikut: LKS Penyandang Disabilitas sebanyak 2.100 orang, LKS Lanjut Usia sebanyak 400 orang, LKSA (anak) sebanyak 1.700 orang, LKS PGOT sebanyak 250 orang.

#### **b. Rehabilitasi Sosial dalam Panti**

Rehabilitasi sosial PMKS terlantar yang mendapatkan penanganan dan rehabilitasi sosial di 27 Panti Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas daya tampung sebanyak 4.602 orang.

### **2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

#### **a. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal**

Kegiatan pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pada tahun 2023 tercapai 100% anak yang terfasilitasi melalui pengangkatan anak di 35 Kabupaten/Kota.

#### **b. Pengolahan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**

Indikator tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu persentase fakir miskin yang telah tervalidasi dengan realisasi 100 %, secara teknis capaian RKPD sesuai target dan target RPJMD akan tercapai pada tahun kelima. Permasalahan yang dihadapi dalam

kegiatan pengolahan data fakir miskin, belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) dan besarnya *exclusion error* dan *inclusion error* sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya.

Selain itu terdapat permasalahan indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dalam nomenklatur kepmendagri tidak mendukung aktivitas pengolahan data fakir miskin.

- c. PMKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial Kartu Jateng Sejahtera / KJS)

Memberikan bantuan sosial terhadap PMKS Non Produktif yang mendapatkan jaminan sosial melalui kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebanyak 12.764, selain itu tahun 2022 dan 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan penyaluran BLT DID dan BLT DBHCHT.

### **3. Program Penanganan Bencana**

Penangan bencana alam dan bencana sosial di Jawa Tengah tercapai target 100 %, korban bencana alam sebanyak 60.340 orang yang terdampak bencana alam di Jawa Tengah.

Capaian kinerja bencana sosial tercapai 100 % sesuai dengan target sebanyak 1.305 orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal.

### **4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan tercapai target 100 % dengan kegiatannya yaitu pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik deberkasi daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal.

Sedangkan Indikator prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang melaksanakan UKS tahun 2023 over capaian dari target sesesar 34,38% atau sebanyak 10,365 PSKS mendapatkan penguatan tercapai melampaui target sebesar 36,59 %

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian  Tahun 2023	Proyeksi  Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas			34,38	7,70	36,59	7,70	
	Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			100	100	100	100	
	Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas			7.759	1.076	7.759	1076	
	Jumlah PSKS yang mendapatkan			1,920	1000	3,840	1000	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial							
2	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan			100	100	100	100	
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal			100	100	100	100	
3.1	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan			4,10	0,20	4.10	0.20	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian  Tahun 2023	Proyeksi  Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pelayanan dasar di dalam Panti							
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti			10.500	3,755	8.400	3,755	
	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti			8.500	2.800	6.800	2,800	
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti			2.000	1.685	1.600	1,685	
	Jumlah			1250	820	1000	820	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian  Tahun 2023	Proyeksi  Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti							
4.1	Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang Diterbitkan			100	100	100	100	
	Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan			100	100	100	100	
4.2	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			1.46	1,82	5.53	7.53	Realisasi tahun 2023 over capaian dari target dengan realisasi dikarenakan realisasi terdukung oleh program DBHCHT dan BLT DID dan over capaian akan berlanjut pada proyeksi realisasi



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2023 dengan angka proyeksi seperti pada tabel
	Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial			51.056	63.820	193.531	263.606	Realisasi tahun 2023 over capaian dari target dengan realisasi dikarenakan realisasi terdukung oleh program DBHCHT dan BLT DID dan over capaian akan berlanjut pada proyeksi realisasi 2023 dengan angka proyeksi seperti pada tabel
4.3	Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan			0,23	0,29	0,38	0,29	
	Per sentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian  Tahun 2023	Proyeksi  Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan			0,11	0,14	0,19	0,25	
	Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan			0,11	0,14	0,19	0,25	
5	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan			100	100	100	100	
	Persentase korban bencana alam yang ditangani			100	100	100	100	
	Persentase			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian  Tahun 2023	Proyeksi  Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	korban bencana sosial yang ditangani							
6	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola			100	100	100	100	
	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola			1	1	1	1	
7	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	

### **2.3. Isu-isu Penting/Strategis dalam penyelenggaraan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yakni :**

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan dan jaminan sosial. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

1. Keterbatasan sarana prasarana panti pelayanan sosial, Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Dasar (hak dasar) pada SPM Sosial Daerah Provinsi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Pengelolaan data sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang penangan kemiskinan.

Peluang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain :

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan arah, metode dan teknik pekerjaan sosial guna pencapaian target pengurangan jumlah PPKS dalam kerangka penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dan penguatan kapasitas dalam rangka peningkatan peran PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suasana otonomi daerah menuntut terbangunnya kemitraan strategis dengan kabupaten/ Kota untuk memastikan Negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan sosial serta memastikan tidak ada golongan masyarakat atau PPKS yang tidak tertangani.
3. Urusan sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Provinsi yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepala daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026, Rencana Strategis PD dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 maka diidentifikasi isu strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Rendahnya tingkat sustainable livelihood PPKS dalam kemandirian sosial
3. Rendahnya kemampuan PPKS non produktif dalam pemenuhan Basic Need Acces
4. Korban Bencana mengalami penurunan tingkat kesejahteraan sosial dikarenakan berkurangnya kemampuan dalam pemenuhan basic need access
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana panti dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial guna menunjang pemenuhan SPM Bidang Sosial

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jawa Tengah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	181.676.979.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jawa Tengah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	144.922.151.000	Difokuskan pada belanja pegawai dan rehab sarpras panti
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jawa Tengah	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	15,41 %	12.362.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jawa Tengah	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	15,41 %	10.721.000.000	Difokuskan pada kapasitas dan honor TKSk se Jawa Tengah
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jawa Tengah	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	0,40 %	83.108.533.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jawa Tengah	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	0,40 %	72.868.427.000	Difokuskan pada rehabilitasi sosial dalam panti pemerintah dan subsidi sosh bagi panti swasta

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jawa Tengah	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,26 %	64.272.160.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jawa Tengah	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,26 %	70.447.160.000	Difokuskan pada bantuan KJS, KUBE dan UEP
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jawa Tengah	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	100 %	4.138.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jawa Tengah	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	100%	3.584.500.000	Difokuskan pada penyediaan logistik, sandang, penampungan bagi korban bencana pada masa tanggap darurat
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Semarang	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	100%	850.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Semarang	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	100%	460.000.000	Fokus pada rehab srpras panti dan santunan bagi janda perintis kemerdekaan dan veteran
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jawa tengah	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapat Penanganan	100 %	200.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jawa tengah	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapat Penanganan	100 %	200.000.000	Fasilitasi Pemulangan.
<b>TOTAL</b>					<b>346.857.672.000</b>					<b>303.203.238.000</b>	



**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota termasuk Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan melalui Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan.

Hibah yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah libah lembaga / organisasi sosial, pemberian hibah dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam dalam hal iniadalah lembaga / organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah melalui dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan yang diusulkan melalui aplikasi e\_rembukan dapat dijelaskan sebagaimana pada table 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Pemberdayaan Sosial / Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jawa Tengah	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Rp.1.509.000.000,-	Bantuan peningkatan kapasitas PSKS kelembagaan / lks kepada LKS/ Karang taruna / PUSKESOS

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, Renja PD Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan daerah tahun 2023, keberlanjutan terhadap perencanaan pembangunan daerah tahun 2024, dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD dan berbagai pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, serta difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter” dengan prioritas daerah sebagai berikut:

dengan prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan

d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Mendasar pada hal tersebut diatas selanjutnya Arah dan Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang terkait dengan Tusi Dinas Sosial dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 guna mendukung :

1. Prioritas 1 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastuktur yang merata dan berkualitas.
2. Priorotas 4 Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Guna mendukung ke dua prioritas diatas ditempuh melalui startegi :

1. Strategi 1 mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat dengan fokus pemenuhan *Basic Need Acces* dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Pelayanan PPKS dalam panti
  - b. Penanganan Korban Bencana
  - c. Bantuan Jaminan Sosial
2. Strategi 2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan fokus Penguatan *Sustainable livelihood* dilaksanakan penanganan fakir miskin melalui KUBE dan UEP Perorangan.
3. Strategi 3 Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan sosial, dilaksanakan melalui :
  - a. Peningkatan sarpras panti
  - b. Peningkatan kapasitas PSKS
  - c. Peningkatan kualitas data.

Program Dan Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PMKS terlantar didalam panti dan diarahkan pada persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan keberfungsian sosial PMKS terlantar didalam panti.
2. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan persentase peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PMKS Non Produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan persentase penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PMKS Non Produktif serta kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin, bantuan sosial kube fakir miskin, pengelolaan data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.
4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan difokuskan pengelolaan taman pahlawan provinsi diarahkan pada persentase pemeliharaan TMPN provinsi.
5. Program Penanganan Bencana diarahkan pada penyelenggraan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

6. Program penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan  
Diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan kinerja didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sub bab sebelumnya yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dimaksudkan guna memastikan bahwa agenda penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terealisasi melalui pembebanan tugas dan fungsi kepada struktur yang ada. Selain itu guna memastikan setiap struktur memiliki tugas dan fungsi sebagai bagian penjabaran Kinerja yang bersangkutan. Adapun tujuan dan Sasaran target kinerja tahun 2025 tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1  
Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	angka	82,5
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	angka	2,8
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	89,5
2	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraannya	%	3,10

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
		Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0,40
		Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	0,11
		Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	2,26
		Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial	%	0,34
		Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraa	%	15,41

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
			n kesejahteraan social		

3.3. Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Proses manajemen risiko pada konteks program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam tabel Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Sosial Tahun 2025 dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis**  
**Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

<b>Tujuan/Sasaran Strategis PD</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	12	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana panti dengan menggunakan skala prioritas melalui aplikasi SUKAPANTI	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember



Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Pelayanan dan rehabilitasi penerima manfaat terganggu	12	Keterbatasan SDM (tenaga teknis juru masak, pramu rukti, petugas kebersihan asrama, petugas keamanan) dalam panti yang pensiun atau mengundurkan diri, di sisi lain rekrutmen SDM baik PNS dan PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Proses rehabilitasi dan pelayanan penerima manfaat terhambat	Secara parsial inovasi pemenuhan kebutuhan sub kegiatan penyediaan permakanan termasuk juru masak melalui penyedia bahan makanan basah pada E-Katalog	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Pelayanan dan rehabilitasi penerima manfaat terganggu	12	Keterbatasan SDM (tenaga teknis juru masak, pramu rukti, petugas kebersihan asrama, petugas keamanan) dalam panti yang pensiun atau mengundurkan diri, di sisi lain rekrutmen SDM baik PNS dan PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Proses rehabilitasi dan pelayanan penerima manfaat terhambat	Optimalisasi SDM yang ada melalui sistem piket	Kepala Panti	Januari-Desember

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025



Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025  
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									158.281.087.000	Dinas Sosial	
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	3.1		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan								12.800.000.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial	%	0.34	12.800.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						12.800.000.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0.04	12.800.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					12.800.000.000		
						Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian	Orang	400	1.800.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.000 2			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.800.000.000		
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	400	1.800.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1)	Orang	800	5.540.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.000 3			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				5.540.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	10000	5.540.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2)	Orang	800	5.460.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.000 3			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				5.460.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	10000	5.460.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial								11.181.000.000		
						Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	15.41	11.181.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						10.721.000.000		
						Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	15.41	10.721.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					250.000.000		
						Jumlah penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Dokumen	200	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	200	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					10.471.000.000		
						Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	1552	9.171.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0001			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				250.000.000		
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	200	250.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				7.112.000.000		
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	1152	7.112.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				1.809.000.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.809.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
						Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	Orang	2000	1.300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				1.300.000.000		
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	2000	1.300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						460.000.000		
						Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	460.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					460.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	400	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				300.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	200	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola	Unit	1	160.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	100.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				60.000.000		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	1	60.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran								57.297.160.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	2.26	57.297.160.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						57.297.160.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	2.26	57.297.160.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					57.297.160.000		
						Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Orang	103528	57.297.160.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.0001			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				57.297.160.000		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	103528	57.297.160.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial								3.784.500.000		
						Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.11	3.784.500.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						200.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	200.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					200.000.000		
						Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang	200	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.0001			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				200.000.000		
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						3.584.500.000		
						Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	3.584.500.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					3.584.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	2000	2.513.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.383.280.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	2000	1.383.280.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				300.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	2000	300.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				150.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	2000	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				379.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	2000	379.720.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				300.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	20000	300.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	2900	1.071.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				184.000.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	500	184.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				87.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	500	87.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				50.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	500	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				600.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	2900	600.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				150.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	500	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial								73.218.427.000		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.4	73.218.427.000	Dinas Sosial	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						72.868.427.000		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlanter yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	3.84	9.010.490.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter di dalam Panti					2.589.900.000		
						Jumlah penyandang disabilitas terlanter yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	4200	2.589.900.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Permakanan				2.019.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	4200	2.019.900.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				200.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				370.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	370.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					5.213.240.000		
						Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	3400	5.213.240.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.692.300.000		
						Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3400	1.692.300.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3.520.940.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	3.520.940.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					577.600.000		
						Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	800	577.600.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				577.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	800	577.600.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					629.750.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkln pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	500	629.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				354.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	500	354.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				275.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Dokumen	8	275.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0.13	2.015.400.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.345.270.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	200	159.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				64.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	64.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				32.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	32.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				25.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	25.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				37.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	37.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	200	1.186.070.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				959.950.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	959.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				199.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	199.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				27.120.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	27.120.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					670.130.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	124.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				81.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	81.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				12.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	545.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				68.800.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	68.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				9.880.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0.13	2.052.205.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.463.445.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	220	167.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				67.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	67.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				32.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	32.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				40.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	40.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	220	1.295.745.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.055.945.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.055.945.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				213.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	213.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				26.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	26.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					588.760.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	80	111.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				77.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	77.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				12.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				12.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	80	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	80	476.960.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				373.760.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	373.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				96.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	96.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,21	3.219.478.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					653.400.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	100	91.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	55.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	100	562.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				86.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	86.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.566.078.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	390	269.075.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				92.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	380	92.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				54.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	390	54.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				48.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	390	48.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				73.125.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	78	73.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	390	2.297.003.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.871.903.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	390	1.871.903.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				378.300.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	390	378.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				46.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	390	46.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0.12	1.857.230.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.857.230.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	280	216.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				76.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	280	76.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				51.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	280	51.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				35.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	280	35.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				52.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	14	52.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	280	1.641.230.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.336.030.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	280	1.336.030.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				271.600.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	280	271.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				33.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	280	33.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0.24	2.961.520.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.643.370.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	360	174.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				75.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	260	75.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				45.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	260	45.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				32.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	32.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				19.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	19.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	360	1.469.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.214.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	260	1.214.720.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				223.450.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	260	223.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				31.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	260	31.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.318.150.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	200	150.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				64.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	64.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	27.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	21.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				37.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	37.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	200	1.167.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				959.950.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	959.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				183.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	183.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	24.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0.16	2.583.151.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					535.260.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	100	83.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	53.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	13.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	40	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	100	451.960.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				373.760.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	373.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				71.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	71.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.223.121.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	150	322.656.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				258.131.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	258.131.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				20.545.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	20.545.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				18.780.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	18.780.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	150	900.465.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				700.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	700.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				190.165.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	190.165.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	9.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					824.770.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	120	114.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	52.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				24.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	24.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				22.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	120	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	120	710.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				575.970.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	575.970.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				120.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	120.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	14.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0.07	1.439.960.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.439.960.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	160	465.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				384.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	384.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				44.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	44.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	160	974.560.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				753.260.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	753.260.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				208.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	208.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.300.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	13.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0.1	2.142.980.000	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					2.142.980.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	240	719.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				32.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	32.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				603.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	603.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				66.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	66.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				18.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	240	1.423.380.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.121.280.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.121.280.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				286.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	286.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	16.100.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0.15	2.503.140.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					895.400.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	100	306.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				50.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	50.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				221.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	221.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	100	588.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				115.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	115.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				6.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.607.740.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	240	190.600.000		
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				70.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	70.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	35.900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				30.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				54.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	48	54.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	240	1.417.140.000		
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.151.940.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.151.940.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				240.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	240.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				25.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	25.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0.14	2.062.390.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					666.900.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	100	98.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	55.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	100	568.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				89.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	89.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.395.490.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	220	190.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				105.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	220	105.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	220	25.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				33.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	220	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				27.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	8	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	220	1.204.640.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				1.027.840.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	220	1.027.840.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				157.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	220	157.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				19.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	220	19.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0.22	3.349.390.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.115.520.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo	Orang	170	121.150.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				64.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	64.450.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	22.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				21.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	21.250.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	8	12.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	994.370.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				794.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	794.240.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				154.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	154.500.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				45.630.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	45.630.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					2.233.870.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	340	213.950.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				125.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	340	125.950.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	340	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				25.500.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	340	25.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	42.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Wldodo	Orang	340	2.019.920.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.588.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	340	1.588.450.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				352.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	340	352.000.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				79.470.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	340	79.470.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0.21	2.948.200.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.948.200.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	480	283.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				103.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	480	103.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				83.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	480	83.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				60.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	480	60.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				36.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	480	2.664.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.242.560.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	480	2.242.560.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				319.950.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	480	319.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				102.390.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	480	102.390.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0.07	1.420.020.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.420.020.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	160	483.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				401.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	401.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				44.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	44.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	160	937.020.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				747.520.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	747.520.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				179.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	179.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				10.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	10.100.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0.17	2.341.150.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.341.150.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	400	235.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				93.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	400	93.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				55.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	400	55.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				50.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	400	50.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				36.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	400	2.106.050.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.863.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.863.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				194.750.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	400	194.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	400	48.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,11	1.572.526.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.572.526.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	250	219.901.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				7.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				117.650.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	250	117.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				44.751.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	250	44.751.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				31.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	125	31.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				18.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	8	18.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	250	1.352.625.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.168.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	1.168.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				159.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	250	159.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				25.625.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	250	25.625.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlarant yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0.12	2.864.020.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant di dalam Panti					946.200.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarant yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	150	110.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				61.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	61.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	18.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.170.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	14.170.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant				15.830.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant	Dokumen	8	15.830.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlarant yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	150	835.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				700.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	700.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				120.950.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	150	120.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarant di Dalam Panti					1.216.870.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlarant yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	140	382.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				323.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	323.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				23.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	23.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	140	834.470.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				654.080.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	654.080.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				171.490.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	171.490.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				8.900.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	8.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					700.950.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi	Orang	100	135.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				92.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	92.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	20	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				12.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	100	565.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				78.550.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	78.550.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				19.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	19.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0.15	2.195.278.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.064.580.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	1.064.580.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				794.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	794.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				118.480.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	118.480.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				64.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	64.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				32.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	32.650.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	21.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	12.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.130.698.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	142.395.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				59.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	59.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				29.070.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	29.070.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	170	21.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				31.875.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	34	31.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	170	988.303.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				811.503.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	811.503.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				156.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	156.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0.25	4.108.995.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.742.480.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	280	189.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				78.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	280	78.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				54.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	280	54.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				35.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	35.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				21.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	8	21.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	280	1.553.180.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.308.060.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	280	1.308.060.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				212.220.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	280	212.220.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				32.900.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	280	32.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.681.340.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	200	540.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				447.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	447.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				53.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	53.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	200	1.140.940.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				934.140.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	934.140.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				194.800.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	194.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					685.175.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	102.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				49.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	49.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				22.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	22.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	20	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	582.725.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				478.575.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	478.575.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				92.150.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	92.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0.22	3.524.290.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.632.140.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	420	255.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				95.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	420	95.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				74.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	420	74.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				52.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	210	52.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				31.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	31.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	42030	2.377.040.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.962.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	420	1.962.240.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				364.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	420	364.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				50.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Unit	420	50.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					892.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	100	301.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				241.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	241.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	100	590.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				116.750.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	116.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				6.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0.08	1.220.005.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.220.005.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	180	154.450.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				68.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	68.400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				30.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	30.050.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				22.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	22.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				33.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	36	33.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	180	1.065.555.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				863.955.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	863.955.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				180.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	180.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	180	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0.08	1.621.910.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.621.910.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	180	524.350.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				426.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	426.150.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				59.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	59.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				13.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	13.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	180	1.097.560.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				840.960.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	840.960.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				248.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	248.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				8.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	180	8.600.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0.22	3.299.222.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.144.602.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	350	157.982.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				67.582.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	350	67.582.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	350	27.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				36.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	175	36.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				26.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	8	26.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha	Orang	350	1.986.620.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.635.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	350	1.635.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				312.920.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	350	312.920.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				38.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	350	38.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.154.620.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	160	147.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				83.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	83.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				44.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	44.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				13.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	13.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	160	1.007.620.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				747.520.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	747.520.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				212.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	212.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	48.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0.06	1.260.550.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.260.550.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	150	360.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				30.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	30.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				286.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	286.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				32.550.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	32.550.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				11.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	11.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	150	900.300.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				700.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	700.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				190.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	190.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	9.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0.12	1.908.953.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.908.953.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	290	192.225.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				45.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provins	Orang	290	45.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				55.775.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	290	55.775.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				36.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	290	36.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				54.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	56	54.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	290	1.716.728.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.391.928.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	290	1.391.928.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				290.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	290	290.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				34.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	290	34.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0.17	2.594.450.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					659.400.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	100	91.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.700.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	55.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	100	568.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				467.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	467.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				91.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	91.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.935.050.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	300	212.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				120.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	300	120.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				31.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	300	31.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				22.500.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	300	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				37.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	8	37.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	300	1.722.850.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.401.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	300	1.401.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				292.650.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	300	292.650.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				28.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	300	28.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,16	2.599.924.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.394.669.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	200	183.947.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				75.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	75.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.947.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	17.947.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				55.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	55.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				35.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	8	35.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	200	1.210.722.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				969.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	969.720.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				221.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	221.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.002.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	20.002.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.205.255.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya	Orang	180	149.367.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.900.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	180	52.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.607.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	180	35.607.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				27.360.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	180	27.360.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				33.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	36	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	180	1.055.888.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				854.288.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	180	854.288.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				180.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	180	180.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	180	21.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,11	2.191.600.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					2.191.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	260	716.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	260	25.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				600.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	260	600.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				38.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	260	38.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				52.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	8	52.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	260	1.475.100.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.214.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	260	1.214.720.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				244.280.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	260	244.280.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	260	16.100.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						350.000.000		
						Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	350.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					350.000.000		
						Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Dokumen	400	350.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI				350.000.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	400	350.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									144.922.151.000	Dinas Sosial	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah					Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82.5	143.922.151.000	Dinas Sosial	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89.5	143.922.151.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						143.922.151.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	340.156.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.656.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	100	133.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.346.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	13.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	58.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	83.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Unit	4	113.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	226.200.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.600.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	72.700.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.200.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	70.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	55.900.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	8.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	399.810.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					129.060.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	129.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.050.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	13.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.730.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Laporan	4	144.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					117.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	4	117.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.300.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	583.980.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					240.820.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	240.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.650.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	18.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.480.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	11.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.230.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	46.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	9.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.660.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				27.750.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.610.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Laporan	4	123.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.610.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	5.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				118.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	118.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					197.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	8	197.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	28.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				138.750.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	138.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	542.780.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					202.170.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	202.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.650.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					160.910.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Laporan	4	160.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.910.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	159.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					152.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	6	152.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	379.435.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					141.685.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	141.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.825.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Laporan	4	120.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	115.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	4	107.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.250.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	7.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.100.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	10.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	407.480.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					156.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	156.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					132.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	132.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	4	109.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	523.620.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.560.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	204.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.040.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	5.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Laporan	4	147.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	140.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	4	157.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	13.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	533.220.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					221.220.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	221.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					142.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Laporan	4	142.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	135.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	4	155.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	243.900.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	100	106.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	65.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Laporan	4	80.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	77.900.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	2	52.300.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	387.960.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.360.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	100	162.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	84.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Laporan	4	112.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	107.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	4	103.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	347.030.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					143.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	143.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				15.510.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	15.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Laporan	4	83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	4	111.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	643.070.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					297.440.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	297.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.750.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.480.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	11.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.250.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	46.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	9.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				27.750.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	149.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					18.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					121.380.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Laporan	4	121.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.380.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	7.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	4	205.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				138.750.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	138.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	327.385.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					124.995.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	124.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	11.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				540.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Laporan	4	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.690.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	4	112.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.840.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	12.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	289.700.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	119.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	100.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	97.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	65.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	488.900.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					211.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	211.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.280.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Laporan	4	119.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	4	144.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	335.925.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.775.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	149.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.745.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Laporan	4	62.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	4	114.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	581.827.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					216.797.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	216.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	18.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.420.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.195.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	18.195.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				16.332.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	16.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	102.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Laporan	4	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	140.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					197.530.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Unit	6	197.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.530.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	39.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				130.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	133.236.423.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					103.412.158.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	103.412.158.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				101.512.158.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	599	101.512.158.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.350.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4	300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				250.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					225.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	225.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					325.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				200.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				125.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.691.050.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.691.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.050.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	250.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.000.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				120.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.800.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					362.515.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	362.515.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				362.515.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	362.515.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17.991.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	17.991.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				710.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	710.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				444.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	444.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.787.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	16.787.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.229.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	8.229.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				180.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				380.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.329.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	7.329.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				240.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	572.860.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					186.860.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	186.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.240.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	24.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.120.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	8	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					191.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Laporan	4	191.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	188.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Unit	6	180.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	51.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	422.785.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.860.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	172.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.875.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	1	11.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.875.000		
						Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	Unit	1	11.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Laporan	4	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	4	107.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	344.650.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.640.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	2.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Laporan	4	83.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	82.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	4	102.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	393.130.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					123.780.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	100	123.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.500.000		
						umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	45.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Laporan	4	149.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	148.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	4	110.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	236.890.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					117.890.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	117.890.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.360.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	6.360.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.850.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2.850.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.480.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.480.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	56.900.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				54.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	54.400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	57.100.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	9.600.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	218.600.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					94.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	94.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	4.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	52.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Laporan	4	64.900.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	62.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	2	54.700.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	261.700.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	100	144.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Laporan	4	45.400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	42.900.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS



Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	2	66.700.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	253.395.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					117.195.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	100	117.195.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	400.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.495.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	12.495.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.500.000		
						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	1	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Laporan	4	65.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	63.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	2	60.700.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	37.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	399.340.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					175.090.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	175.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.490.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	11.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	23.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				420.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.250.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	9.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Laporan	4	110.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	4	104.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.250.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	71.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
								2025					
								Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.8	1.000.000.000	Dinas Sosial			
										1.000.000.000			
								Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.000.000.000	SEKRETARIAT	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000				
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM			
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000				
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM			
JUMLAH									303.203.238.000				

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Program/Kegiata n PD	Indikator Kinerja Program/Kegiata n PD	Pernyataan Risiko	Skala Risik o	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaia n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Anggaran Hibah tidak dapat disalurkan	12	'- Pemilihan Lembaga penerima Hibah (karang taruna) tidak sesuai dengan kategori atau klasifikasi Lembaga penerima Hibah (Karang Taruna) - Proses melengkapi persyaratan berkas administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama dan lembaga penerima Hibah Bidang Sosial belum mengetahui jenis Hibah yang diberikan	- Menurunnya eksistensi lembaga dibidang kesos karena tidak ada dukungan/Tidak terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan lembaga dalam penanganan masalah kesos - Realisasi dukungan pemanfaatan hibah bagi lembaga dibidang kesos tidak terserap	- Melakukan koordinasi dengan Dewan terkait kategori atau klasifikasi Lembaga Penerima Hibah (Karang Taruna) - meminta usulan penggantian Lembaga Penerima Hibah kepada anggota Dewan di perubahan anggaran bagi Lembaga Penerima Hibah yang tidak lolos verifikasi dan validasi	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
-----------------------------------	--	---------------------------------------	----	--	---	---	--	------------------

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	Hasil pengadaan barang/mentu tidak sesuai dengan standar gizi	12	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Pelayanan Permakanan Kepada Penerima Manfaat kurang memenuhi Standar angka Kecukupan Gizi	Desk Perencanaan dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja serta Pembuatan Juklak dan Juknis Kegiatan, Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blangkon	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	hasil pengadaan sandang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sandang.	12	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Kualitas pengadaan sandang tidak sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat.	Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blangkon	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	Penerima Manfaat tidak mendapat haknya untuk memperoleh Banjamsos KJS secara utuh	12	Pendamping Banjamsos KJS tidak menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat secara utuh	Turunnya kepercayaan penerima manfaat kepada Dinsos selaku Penyalur Banjamsos	Melakukan Monitoring pada Pendamping Banjamsos KJS dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar melaporkan pencairan Banjamsos KJS setiap tahapnya dengan melampirkan dokumentasi penyaluran serta tanda terima kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	Hasil pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis	12	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai kaidah pengadaan barang/ jasa pemerintah	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan sasaran kegiatan dan Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Desk Perencanaan dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja serta Pembuatan Juklak dan Juknis Kegiatan, Pengadaan lewat e-	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember



Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						purchasing dan E-blangkon		
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Terdapat penerima bantuan jaminan sosial yang tidak dapat mengambil pada tahap penyaluran	12	perbedaan data pada identitas kependudukan atau jangka waktu penyaluran sudah berakhir	PPKS tidak menerima bantuan jaminan sosial	Memberikan usulan pengganti penerima bantuan jaminan sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Januari-Desember

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan rencana kerja program dan kegiatan selama satu tahun anggaran kedepan dan juga merupakan terjemahan teknis tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Dengan demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan informasi perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang di lingkup Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan tidak terlepas dari klasifikasi dan kodetifikasi yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga diharapkan dapat menangani, melayani dan meminimalisir permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya permasalahan bidang sosial. Untuk mendorong keberhasilan pembangunan bidang sosial, rencana kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan kontrol terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan dan mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter**"

Rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dirancang dengan mempertimbangkan dan telah melalui proses analisis manajemen resiko, Keberhasilan rencana kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak, baik lintas Perangkat Daerah, Legislatif dan masyarakat, apabila dalam proses pelaksanaan diperlukan penyesuaian yang disebabkan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan ditindak lanjuti dengan perubahan rencana kerja dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan, ketentuan regulasi tanpa mengurangi target kinerja. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin.

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. **Sinergi dan Kolaborasi Antar-Pihak:** Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kerja sama lintas sektor dengan dinas terkait, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta. Keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat penyelesaian isu-isu sosial secara lebih komprehensif.
2. **Optimalisasi Sumber Daya:** Mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, diperlukan strategi optimalisasi agar seluruh program dapat terlaksana dengan efisien. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan sosial diharapkan mampu menutup keterbatasan tersebut.
3. **Monitoring dan Evaluasi:** Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan program pada periode berikutnya.
4. **Adaptasi terhadap Dinamika Sosial:** Diperlukan fleksibilitas untuk merespon dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau peningkatan angka pengangguran. Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini harus dapat menyesuaikan dan merespons kebutuhan darurat yang mungkin timbul.
5. **Keberlanjutan Program:** Program-program yang telah dijalankan harus berfokus pada keberlanjutan, sehingga dampak positif yang dihasilkan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Penyiapan rencana tindak lanjut sangat penting agar setiap program memiliki dampak yang signifikan dalam Pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah.

Semoga rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahun ke dua dari Renstra Dinas Sosial 2024-2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tabel 1  
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Strategis	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat
2	Sasaran Strategis	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Penerima Manfaat tidak diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat	Risiko Strategis	Kondisi penerima manfaat baik secara psikis dan fisik yang sulit diterima keluarga maupun masyarakat	Penerima manfaat tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya	Penerima Manfaat
3	Sasaran Strategis	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Pelayanan dan rehabilitasi penerima manfaat terganggu	Risiko Strategis	Keterbatasan SDM (tenaga teknis juru masak, pramu rukti, petugas kebersihan asrama, petugas keamanan) dalam panti yang pensiun atau mengundurkan diri, di sisi lain rekrutmen SDM baik PNS dan PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Proses rehabilitasi dan pelayanan penerima manfaat terhambat	Penerima Manfaat dalam panti

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Strategis	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	Bias Penanganan pada kelompok rentan korban bencana	Risiko Strategis	Masih belum jelasnya pembagian tupoksi penanganan korban bencana terutama pada kelompok rentan dan Data pilah korban bencana tidak tersedia	Kurang optimalnya penanganan korban bencana pada saat bencana hingga pasca bencana	Sasaran program/ Korban bencana
5	Sasaran Strategis	Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	Penerima Manfaat tidak sesuai dengan kriteria	Risiko Strategis	Pendamping belum sepenuhnya memahami kriteria penerima manfaat	Belum semua PPKS non produktif yang masuk kategori penerima bantuan tertangani	Penerima bantuan/ sasaran program
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial	KUBE tidak mengalami kenaikan pendapatan	Risiko Strategis	Bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk mengembangkan usaha/ tidak sesuai dengan proposal pengajuan	Laporan tidak akuntabel	Penerima bantuan/ sasaran program
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PSKS tidak maksimal dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	Risiko Strategis	Rendahnya kapasitas PSKS	Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat belum dapat ditangani secara optimal	PSKS dan PPKS
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Penerapan pengelolaan risiko terbatas pada pemenuhan dokumen	Risiko Strategis	Masih kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan pengelolaan risiko dan tindak pengendaliannya	Penerapan pengelolaan risiko belum dapat memitigasi risiko yang ada	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial menurun.	Risiko Strategis	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik belum menjangkau masyarakat secara luas	Masyarakat belum mengetahui Standar Pelayanan Publik pada Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial	OPD, Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Ketidaksesuaian realisasi kinerja perangkat daerah	Risiko Operasional	Dinamika Perubahan Kebijakan Pemerintah	Capaian target kinerja tidak selaras	Unit Kerja
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Anggaran Hibah tidak dapat disalurkan	Risiko Operasional	'- Pemilihan Lembaga penerima Hibah (karang taruna) tidak sesuai dengan kategori atau klasifikasi Lembaga penerima Hibah (Karang Taruna) - Proses melengkapi persyaratan berkas administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama dan lembaga penerima Hibah Bidang Sosial belum mengetahui jenis Hibah yang diberikan	- Menurunnya eksistensi lembaga dibidang kesos karena tidak ada dukungan/Tidak terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan lembaga dalam penanganan masalah kesos - Realisasi dukungan pemanfaatan hibah bagi lembaga dibidang kesos tidak terserap	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Hibah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Menurunnya motivasi, eksistensi dan kinerja PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk melayani PPKS	Risiko Operasional	Rendahnya kapasitas PSKS	Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat belum dapat ditangani secara optimal	Penerima Program/PPKS
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	Kondisi Makam Pahlawan di TMPN Giri Tunggal Semarang kurang terawat	Risiko Operasional	Sarana Prasarana di TMPN Giri Tunggal Semarang dalam kondisi Rusak Ringan, Sedang dan Berat	Menurunnya tingkat apresiasi terhadap jasa pahlawan	Masyarakat
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	Hasil pengadaan barang/menu tidak sesuai dengan standar gizi	Risiko Fraud	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Pelayanan Permakanan Kepada Penerima Manfaat kurang memenuhi Standar angka Kecukupan Gizi	Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penerima Manfaat
2	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	hasil pengadaan sandang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sandang.	Risiko Fraud	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Kualitas pengadaan sandang tidak sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat.	Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penerima Manfaat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima Manfaat di dalam Panti
4	Sasaran Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Pemalsuan dokumen persyaratan pengangkatan anak	Risiko Operasional	Calon Orang Tua Angkat tidak mengetahui Prosedur dan tahapan pengangkatan anak	Proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan regulasi	Calon Orang Tua Angkat dan PPKS
1	Sasaran Program	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	Data Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan kurang akurat	Risiko Operasional	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tidak memiliki dokumen legal dan akses mandiri untuk kembali ke domisili asal	Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang terlantar meningkat	Warga Negara Migran korban tindak kekerasan
2	Sasaran Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	Penerima Manfaat tidak mendapatlan haknya untuk memperoleh Banjamsos KJS secara utuh	Risiko Fraud	Pendamping Banjamsos KJS tidak menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat secara utuh	Turunnya kepercayaan penerima manfaat kepada Dinsos selaku Penyalur Banjamsos	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Manfaat
3	Sasaran Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	Penerima Jaminan Sosial tidak sesuai kriteria	Risiko Operasional	TKSK selaku pendamping KJS belum sepenuhnya memahami kriteria penerima manfaat	Bantuan Jaminan Sosial tidak tepat sasaran	Penerima Bantuan KJS



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Program	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	Hasil pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis	Risiko Fraud	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai kaidah pengadaan barang/ jasa pemerintah	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan sasaran kegiatan dan Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Masyarakat Korban Bencana
5	Sasaran Strategis	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	Kelompok rentan korban bencana belum mendapatkan prioritas saat tanggap darurat	Risiko Operasional	Sarpras penanganan bencana bagi kelompok rentan masih terbatas	Kelompok rentan Korban bencana tidak mendapatkan penanganan khusus	Korban Bencana
1	Sasaran Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	Keberhasilan program KUBE/ tingkat kemandirian anggota KUBE tidak maksimal	Risiko Operasional	Perubahan dinamika kebijakan	Belum semua KUBE mendapatkan fasilitasi bantuan	Penerima Bantuan KUBE
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Pantii Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Penyediaan sarana prasarana pantii untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana pantii terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam pantii	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Pantii Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Penyediaan sarana prasana pantii untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana pantii terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam pantii	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Pantii Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Penyediaan sarana prasarana pantii untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasara pantii terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam pantii	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	Risiko Operasional	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	Risiko Operasional	Ketersediaan SDM dan dukungan Sarpras kurang memadai	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan terhambat	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Dokumen rencana kerja tahunan tidak sesuai dengan dokumen Rencana Strategis	Risiko Operasional	Dinamika Perubahan kebijakan	Target kinerja OPD tidak sesuai dengan dokumen Rencana Strategis	Unit Kerja
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Ketidaksesuaian penggunaan kode rekening	Risiko Operasional	Kurang teliti dalam pengadministrasian pembebanan kode rekening (kode rekening saat perencanaan belum sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan)	Ketidaksesuaian kode rekening saat perencanaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan	Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala UPT, bagian akuntansi dan aset

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terdapat aset yang tidak dapat dilakukan pemeliharaan	Risiko Operasional	Terdapat aset yang tidak tercatat dalam BMD	Terganggu kinerja perangkat daerah	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Waktu penyelesaian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi kepegawaian	Kurangnya pemahaman pegawai terkait aplikasi kepegawaian	Pegawai
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa ATK, peralatan listrik, peralatan kebersihan tidak sesuai dengan kebutuhan	Risiko Operasional	Terdapat kebutuhan yang belum dialokasikan	Layanan administrasi umum yang sesuai standar layanan terhambat	OPD
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pemenuhan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai dengan usulan	Risiko Operasional	Ketersediaan barang dan Jasa yang di butuhkan tidak ada pada penyedia	Pelayanan menjadi kurang optimal	OPD
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang Milik Daerah mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Usia aset yang dimiliki dan kurangnya perawatan	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	OPD
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Terdapat masyarakat seringkali melakukan UGB dan PUB tanpa izin	Risiko Operasional	Informasi perizinan penyelenggaraan UGB dan PUB belum dipahami masyarakat secara luas	Masih adanya penyelenggara undian yang tidak memenuhi peraturan tentang Undang - Undang tentang Undian dan pengumpulan uang atau Barang .	Penerima Masyarakat
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	Menurunnya motivasi, eksistensi dan kinerja PSKS dalam membantu Pemerintah guna menangani PPKS	Risiko Operasional	Belum meratanya pelibatan PSKS dalam penyelenggaraan kesos	Permasalahan sosial semakin kompleks dan berkembang	PSKS dan PPKS
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	Program kesejahteraan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, masih ada yang belum dipahami oleh masyarakat	Risiko Operasional	Penyampaian informasi tentang program kesejahteraan sosial kepada masyarakat masih belum tersampaikan secara luas dan jelas	Adanya program kesejahteraan sosial yang diberikan kepada masyarakat belum sesuai dengan sasaran dan target	Masyarakat
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola	Sarana Prasarana penunjang di TMPN Giri Tunggal Semarang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Usia sarana prasarana yang sudah lama digunakan dan kurang perawatan	Pengunjung/Peziarah kurang nyaman serta pelaksanaan kegiatan di TMPN kurang maksimal.	Pengunjung/Peziarah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Menurunnya pemahaman dan berkurangnya pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dalam kehidupan sehari-har	Risiko Operasional	Kurangnya Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial di Masyarakat	Masyarakat mengalami degradasi sosial	Masyarakat
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Keterlambatan dalam pemenuhan penyediaan bantuan subsidi permakanaan (SOSH) bagi Penyandang Disabilitas dalam LKS/Panti Swasta	Risiko Operasional	Kenaikan harga bahan makan dan minimnya ketersediaan stok bantuan permakanaan SOSH bagi LKS/Panti Swasta Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan pemenuhan bantuan subsidi permakanaan SOSH bagi gelandangan dan pengemis terlantar dalam LKS/Panti swasta menjadi terhambat	Penerima Manfaat di Dalam Panti
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Keterlambatan dalam pemenuhan penyediaan bantuan subsidi permakanaan (SOSH) bagi Anak dalam LKSA/Panti Swasta	Risiko Operasional	Kenaikan harga bahan makan dan minimnya ketersediaan stok bantuan permakanaan SOSH bagi LKSA/Panti Swasta	Pelaksanaan pemenuhan bantuan subsidi permakanaan SOSH bagi gelandangan dan pengemis terlantar dalam LKS/Panti swasta menjadi terhambat	Penerima Manfaat dalam Panti
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Keterlambatan dalam pemenuhan penyediaan bantuan subsidi permakanaan (SOSH) bagi Lanjut Usia dalam LKS/Panti Swasta	Risiko Operasional	Kenaikan harga bahan makan dan minimnya ketersediaan stok bantuan permakanaan SOSH bagi LKS/Panti Swasta	Pelaksanaan pemenuhan bantuan subsidi permakanaan SOSH bagi gelandangan dan pengemis terlantar dalam LKS/Panti swasta menjadi terhambat	Penerima Manfaat di Panti

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Keterlambatan dalam pemenuhan penyediaan bantuan subsidi permakanaan (SOSH) bagi Gelandangan dan Pengemis dalam LKS/Panti Swasta	Risiko Operasional	Kenaikan harga bahan makan dan minimnya ketersediaan stok bantuan permakanaan SOSH bagi LKS/Panti Swasta Gelandangan dan Pengemis	Pelaksanaan pemenuhan bantuan subsidi permakanaan SOSH bagi gelandangan dan pengemis terlantar dalam LKS/Panti swasta menjadi terhambat	Penerima Manfaat di Panti
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Pemalsuan dokumen persyaratan pengangkatan anak	Risiko Operasional	Calon Orang Tua Angkat tidak mengetahui Prosedur dan tahapan pengangkatan anak	Proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan regulasi	Masyarakat, calon orang tua angkat
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Data Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan kurang akurat	Risiko Operasional	Data Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan kurang akurat	Warga Negara Migran korban tindak kekerasan terlantar	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Terdapat penerima bantuan jaminan sosial yang tidak dapat mengambil pada tahap penyaluran	Risiko Operasional	perbedaan data pada identitas kependudukan atau jangka waktu penyaluran sudah berakhir	PPKS tidak menerima bantuan jaminan sosial	PPKS sasaran program
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Kesulitan menjangkau kelompok rentan dilokasi pengungsian	Risiko Operasional	Situasi dan kondisi di lokasi bencana yang menampung kelompok rentan memerlukan perlakuan khusus	Tidak tertanganinya kelompok rentan dilokasi pengungsian	Korban Bencana



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Tidak terfasilitasinya dalam pendampingan Orang Terlantar/korban bencana sosial dengan kasus khusus asal Jawa tengah yang beada di luar Provinsi	Risiko Operasional	Orang terlantar yang hilangan harta benda, kehabisan bekal dll, dalam beberapa kasus terulang dengan oknum yang sama	Meningkatnya jumlah kejadian Orang Terlantar	Mayarakat, orang terlantar
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1)	Keberhasilan program KUBE/ tingkat kemandirian anggota KUBE tidak maksimal	Risiko Operasional	Pendampingan KUBE belum maksimal	KUBE tidak mampu memasarkan hasil produksinya	Kelompok Usaha Bersama
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2)	Keberhasilan program KUBE/ tingkat kemandirian anggota KUBE tidak maksimal	Risiko Operasional	Pendampingan KUBE belum maksimal	KUBE tidak mampu memasarkan hasil produksinya	Kelompok Usaha Bersama
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian	Daerah tidak memiliki basis data kemiskinan sebagai dasar penetapan sasaran intervensi sesuai kebijakan daerah jawa tengah	Risiko Operasional	Perubahan kebijakan pengelolaan data kemiskinan/DTKS dari semula pendekatan RUTA menjadi jiwa	Data tidak valid dan update	Masyarakat PPKS

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima Manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima Manfaat dan Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Hasil pengadaan barang/jasa permakanan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Ketidakersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Ketidakterediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha	Ketidakterediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Ketidakterediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Hasil pengadaan barang/jasa permakanan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Ketidakterersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Ketidakterediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Hasil pengadaan barang/jasa permakanan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Ketidakterersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	Penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo	Ketidakterediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT



No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (Komputer dan Printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya pemeliharaan tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggu kinerja perangkat daerah, Kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Hasil pengadaan barang/jasa permakanaan tidak sesuai baik secara kualitas dan kuantitas	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pengecekan rutin terhadap bahan permakanaan yang datang dan koordinasi/komplain untuk penggantian oleh penyedia jika terjadi ketidaksesuaian.	Tidak terkontrolnya pengadaan bahan permakanaan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Penerima manfaat dan UPT
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Ketidakterediaan tenaga kesehatan yang standby di Panti	Risiko Kemitraan	Keterbatasan SDM pelayanan kesehatan didalam panti	penanganan kesehatan yang bersifat darurat membutuhkan prosedur dan waktu yang relatif lama	Penerima manfaat dan UPT
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Sarana prasarana pendukung yang tersedia (komputer dan printer) tidak menunjang layanan administrasi umum dengan baik	Risiko Operasional	Banyak sarpras pendukung yang sudah memasuki fase rusak sedang hingga berat, membuat biaya tinggi	Terganggunya pelayanan administrasi kantor dalam hal penggunaan komputer dan printer (Administrasi dan surat menyurat)	Unit Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kenaikan pada pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Risiko Operasional	Penggunaan sumber daya air dan listrik di asrama yang masih belum dapat terkontrol dengan baik	Lonjakan tagihan, turunnya tegangan listrik dan air PDAM yang sering mati khususnya di asrama	Unit Kerja
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Meningkatnya kerusakan pada BMD	Risiko Operasional	Usia penggunaan aset	Terganggunya kinerja perangkat daerah, kegiatan perkantoran dan pelayanan penerima manfaat terganggu	Unit Kerja



Tabel 2  
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	4	4	16	Ada	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana panti dengan menggunakan skala prioritas melalui aplikasi SUKAPANTI	Memadai	3	4	12
Penerima Manfaat tidak diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat	3	4	12	Ada	Optimalisasi kegiatan reunifikasi untuk memastikan keluarga/ masyarakat menerima penerima manfaat purna bina pasca pelayanan rehabilitasi sosial	Memadai	3	3	9
Pelayanan dan rehabilitasi penerima manfaat terganggu	4	4	16	Ada	Optimalisasi SDM yang ada	Memadai	3	4	12
Bias Penanganan pada kelompok rentan korban bencana	3	4	12	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan, serta pemenuhan layanan dukungan psikososial	Memadai	3	3	9
Penerima Manfaat tidak sesuai dengan kriteria	3	4	12	Ada	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran jaminan sosial di Kabupaten/Kota	Memadai	3	3	9
KUBE tidak mengalami kenaikan pendapatan	3	4	12	Ada	Melaksanakan Monitoring KUBE secara berjenjang sejak tingkat desa oleh pendamping KUBE dan petugas provinsi	Memadai	3	3	9
PSKS tidak maksimal dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	3	4	12	Ada	Meningkatkan kapasitas PSKS melalui BinteK dan mendorong sertifikasi SDM Penyelenggara kesejahteraan sosial	Memadai	3	3	9
Penerapan pengelolaan risiko terbatas pada pemenuhan dokumen	3	4	12	Ada	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan manajemen risiko melalui pelaporan pengelolaan risiko tiap semester	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial menurun.	3	4	12	Ada	Melakukan monitoring penerapan Standar Pelayanan Publik pada Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial	Memadai	3	3	9
Ketidaksesuaian realisasi kinerja perangkat daerah	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan TAPD penanggung jawab	Memadai	2	2	4
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Anggaran Hibah tidak dapat disalurkan	3	5	15	Ada	- Melakukan koordinasi dengan Dewan terkait kategori atau klasifikasi Lembaga Penerima Hibah (Karang Taruna) - meminta usulan penggantian Lembaga Penerima Hibah kepada anggota Dewan di perubahan anggaran bagi Lembaga Penerima Hibah yang tidak lolos verifikasi dan validasi	Memadai	3	4	12
Menurunnya motivasi, eksistensi dan kinerja PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk melayani PPKS	4	3	12	Ada	Meningkatkan kapasitas PSKS melalui BinteK dan Fasilitasi Sertifikasi	Memadai	3	2	6
Kondisi Makam Pahlawan di TMPN Giri Tunggal Semarang kurang terawat	3	3	9	Ada	Penyusunan skala prioritas rehab sarpras TMPN Giri Tunggal	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Hasil pengadaan barang/menu tidak sesuai dengan standar gizi	3	5	15	Ada	Desk Perencanaan dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja serta Pembuatan Juklak dan Juknis Kegiatan, Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blangkon	Memadai	3	4	12
hasil pengadaan sandang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sandang.	3	5	15	Ada	Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blangkon	Memadai	3	4	12
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	3	9	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	2	2	4
Pemalsuan dokumen persyaratan pengangkatan anak	3	3	9	Ada	Sosialisasi pengangkatan anak bagi Dinas Sosial Kabupaten/Kota	Memadai	2	2	4
Data Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan kurang akurat	3	3	9	Ada	Mengidentifikasi dan assesment ulang serta koordinasi dengan pemangku kepentingan dan Kabupaten/ Kota Asal	Memadai	2	2	4
Penerima Manfaat tidak mendapatlan haknya untuk memperoleh Banjamsos KJS secara utuh	3	5	15	Ada	Melakukan Monitoring pada Pendamping Banjamsos KJS dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar melaporkan pencairan Banjamsos KJS setiap tahapnya dengan melampirkan dokumentasi penyaluran serta tanda terima kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	4	12
Penerima Jaminan Sosial tidak sesuai kriteria	3	3	9	Ada	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran di Kabupaten/ Kota	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Hasil pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis	3	5	15	Ada	Desk Perencanaan dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja serta Pembuatan Juklak dan Juknis Kegiatan, Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blangkon	Memadai	3	4	12
Kelompok rentan korban bencana belum mendapatkan prioritas saat tanggap darurat	3	3	9	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan	Memadai	2	2	4
Keberhasilan program KUBE/ tingkat kemandirian anggota KUBE tidak maksimal	3	3	9	Ada	Fasilitasi Pendampingan, Monev dan Bimbingan lanjut	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6



Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai target	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel	Memadai	2	3	6
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	3	4	12	Ada	Melakukan rehab sarana prasarana dengan menggunakan skala prioritas	Memadai	3	3	9
Realisasi kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan	3	3	9	Ada	Menyusun kelengkapan dokumen SPJ kegiatan pelayanan umum, kepegawaian,	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
keuangan perangkat daerah tidak sesuai target					dan keuangan dipersiapkan secara transparan dan akuntabel				

Tabel 3  
Risiko Prioritas

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	12	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti
Pelayanan dan rehabilitasi penerima manfaat terganggu	12	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Keterbatasan SDM (tenaga teknis juru masak, pramu rukti, petugas kebersihan asrama, petugas keamanan) dalam panti yang pensiun atau mengundurkan diri, di sisi lain rekrutmen SDM baik PNS dan PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Proses rehabilitasi dan pelayanan penerima manfaat terhambat
Anggaran Hibah tidak dapat disalurkan	12	Kepala Bidang selaku KPA dan PPTK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan Lembaga penerima Hibah (karang taruna) tidak sesuai dengan kategori atau klasifikasi Lembaga penerima Hibah (Karang Taruna)</li> <li>- Proses melengkapi persyaratan berkas administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama dan lembaga penerima Hibah Bidang Sosial belum mengetahui jenis Hibah yang diberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya eksistensi lembaga dibidang kesos karena tidak ada dukungan/Tidak terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan lembaga dalam penanganan masalah kesos</li> <li>- Realisasi dukungan pemanfaatan hibah bagi lembaga dibidang kesos tidak terserap</li> </ul>

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Hasil pengadaan barang/menu tidak sesuai dengan standar gizi	12	Kepala Dinas selaku PA, PPTK	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Pelayanan Permakanaan Kepada Penerima Manfaat kurang memenuhi Standar angka Kecukupan Gizi
hasil pengadaan sandang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sandang.	12	Kepala Dinas selaku PA, PPTK	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Kualitas pengadaan sandang tidak sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat.
Penerima Manfaat tidak mendapatlan haknya untuk memperoleh Banjamsos KJS secara utuh	12	Kepala Bidang selaku KPA, PPTK dan PP	Pendamping Banjamsos KJS tidak menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat secara utuh	Turunnya kepercayaan penerima manfaat kepada Dinsos selaku Penyalur Banjamsos
Hasil pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis	12	Kepala Dinas selaku PA, PPTK	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai kaidah pengadaan barang/ jasa pemerintah	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan sasaran kegiatan dan Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Terdapat penerima bantuan jaminan sosial yang tidak dapat mengambil pada tahap penyaluran	12	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Sub Koord	perbedaan data pada identitas kependudukan atau jangka waktu penyaluran sudah berakhir	PPKS tidak menerima bantuan jaminan sosial

Tabel 4  
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Penyediaan sarana prasarana panti untuk penerima manfaat mengalami kerusakan berat	12	Pemeliharaan sarana prasarana panti terbatas pada rehab ringan	Penerima manfaat menjadi kurang nyaman tinggal di dalam panti	Melakukan pemeliharaan sarana prasarana panti dengan menggunakan skala prioritas melalui aplikasi SUKAPANTI	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Pelayanan dan rehabilitasi penerima manfaat terganggu	12	Keterbatasan SDM (tenaga teknis juru masak, pramu rukti, petugas kebersihan asrama, petugas keamanan) dalam panti yang pensiun atau mengundurkan diri, di sisi lain rekrutmen SDM baik PNS dan PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Proses rehabilitasi dan pelayanan penerima manfaat terhambat	Secara parsial inovasi pemenuhan kebutuhan sub kegiatan penyediaan permakanan termasuk juru masak melalui penyedia bahan makanan basah pada E-Katalog	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Pelayanan dan rehabilitasi penerima manfaat terganggu	12	Keterbatasan SDM (tenaga teknis juru masak, pramu rukti, petugas kebersihan asrama, petugas	Proses rehabilitasi dan pelayanan penerima manfaat terhambat	Optimalisasi SDM yang ada melalui sistem piket	Kepala Panti	Januari-Desember

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				keamanan) dalam panti yang pensiun atau mengundurkan diri, di sisi lain rekrutmen SDM baik PNS dan PPPK dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Anggaran Hibah tidak dapat disalurkan	12	' - Pemilihan Lembaga penerima Hibah (karang taruna) tidak sesuai dengan kategori atau klasifikasi Lembaga penerima Hibah (Karang Taruna) - Proses melengkapi persyaratan berkas administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama dan lembaga penerima Hibah Bidang Sosial belum mengetahui jenis Hibah yang diberikan	- Menurunnya eksistensi lembaga dibidang kesos karena tidak ada dukungan/Tidak terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan lembaga dalam penanganan masalah kesos - Realisasi dukungan pemanfaatan hibah bagi lembaga dibidang kesos tidak terserap	- Melakukan koordinasi dengan Dewan terkait kategori atau klasifikasi Lembaga Penerima Hibah (Karang Taruna) - meminta usulan penggantian Lembaga Penerima Hibah kepada anggota Dewan di perubahan anggaran bagi Lembaga Penerima Hibah yang tidak lolos verifikasi dan validasi	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari- Desember



<b>Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	Hasil pengadaan barang/menu tidak sesuai dengan standar gizi	12	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Pelayanan Permakanan Kepada Penerima Manfaat kurang memenuhi Standar angka Kecukupan Gizi	Desk Perencanaan dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja serta Pembuatan Juklak dan Juknis Kegiatan, Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blankon	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	hasil pengadaan sandang tidak sesuai dengan spesifikasi barang sandang.	12	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai aturan dan adanya kenaikan harga pasar	Kualitas pengadaan sandang tidak sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat.	Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blankon	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	Penerima Manfaat tidak mendapatlan haknya untuk memperoleh Banjamsos KJS secara utuh	12	Pendamping Banjamsos KJS tidak menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat secara utuh	Turunnya kepercayaan penerima manfaat kepada Dinsos selaku Penyalur Banjamsos	Melakukan Monitoring pada Pendamping Banjamsos KJS dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar melaporkan pencairan Banjamsos KJS setiap tahapnya dengan melampirkan dokumentasi penyaluran serta tanda terima kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	Hasil pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi teknis	12	Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai kaidah pengadaan barang/ jasa pemerintah	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan sasaran kegiatan dan Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Desk Perencanaan dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja serta Pembuatan Juklak dan Juknis Kegiatan, Pengadaan lewat e-purchasing dan E-blankon	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember

<b>Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Terdapat penerima bantuan jaminan sosial yang tidak dapat mengambil pada tahap penyaluran	12	perbedaan data pada identitas kependudukan atau jangka waktu penyaluran sudah berakhir	PPKS tidak menerima bantuan jaminan sosial	Memberikan usulan pengganti penerima bantuan jaminan sosial	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Januari- Desember